

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.
- Andi, S., & Asis, A., 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.
- Asep Saepul Hamdi, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasidalam pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.
- Hadi Subbhan, 2008, *Hukum kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.
- Harper, Robert Francis, 1999, *The Code of Hammurabi, King of Babylon, The Lawbook Exchange*.
- J.W. Harris, Law and Legal Science, 1979, Oxford : Clarendon Press, hlm 123.
- John H Farrar, Introduction to Legal Method, 1977, London: Sweet & Maxwell, hlm 10.
- K. Wantjik Saleh, 2002, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9 Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 109 dan 110 Kencana, Jakarta.
- Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip ke lima
- Kramer, Samuel Noah, 1971, *The Sumerians, Their History, Culture, and Character*, University of Chicago.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 282, sebagaimana dikutip dari Merriam Webster's Dictionary of Law,
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Kesatu, Surabaya : Reality Pubilser, hlm. 270

- Merriam Webster Springfield, 1996, Massachusetts, hlm. 451
- Mertha, I Ketut. 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Princeton University Press, hlm. 24
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 45.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *dalam Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 18.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 109 dan 110
- Nindyo Pramono, Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 99
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 94.
- Prince, J. Dyneley, 1904, *The Code of Hammurabi*, *The American Journal of Theology*, University of Chicago Press.
- RechtsVinding, 2012, *Legal Research Analysis*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 19.
- Sulastriyono, 2014, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum – Program Sarjana Mata Kuliah Wajib, Bahan Kuliah, Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, hlm. 30
- Sumardi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, hlm. 22
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan*

*Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, hlm. 5-9

Yunus Husein, 2010, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia Asset Forfeiture of Crime In Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 7 No 4 Desember, 570.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Agustina Shinta, 2015, *“Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,”* Masalah-Masalah Hukum 44, no. 4 :504

Dian Cahyaningrum, 2017, *“Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah,”* Majalah Info Singkat Hukum, Vol.IX, No. 16, hlm. 3.  
Halaman 121

Jasmin Kartika, 2020, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Kartika Irwanti, Anggit Sinar Sitoresmi. *“Permohonan Penundaan Kewajiban*

*Pembayaran Utang Dan Akibat Hukum Terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Jurnal Pandecta, Vol. 13 No. (2).*

Onneri Khairoza, 2012, “*Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*”, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 7.

Pandiangan Roni, 2022, *Jurnal : Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana*. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4 (5). pp. 4047-4060. ISSN 2685-9351

Setiawan Putra Dony, 2017, “*Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit*”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Sidabutar Jakobus Marisi Lambok, 2019 "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti," *Anti Korupsi Integrasi* 5, no. 2:84.

Wardhana Wisnu Adji Tri, 2015, “*Sita Umum kepailitan dan sita pidana terhadap harta pailit*”, Tesis, Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam

#### **D. Putusan**

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/Kma/Sk/Iv/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

NO.26/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN /2022/PN NIAGAJKT.PST

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU- XII/2014 tentang perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **E. Internet**

Kemenag, “*Kemenag cabut izin first travel sebagai PPIU*”,  
<https://kemenag.go.id/berita/read/505159/kemenag-cabut-izin-first-travel-sebagai-ppiu>, diakses pada 6 Juli 2023 pukul 07.25 WIB.

Nanda Narendra Putra. First Travel Masuk PKPU Tetap, 'Pihak Ketiga' Akan Berangkatkan 60 Ribu Jamaah. Hukum Online. [Diposting 5 Oktober 2017](#).  
[Diakses 8 september 2023](#)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengabulkan Permohonan PKPU FirstTravel. CNN Indonesia. Tiara sutari. [Diposting Rab, 23 Agustus 2017 pukul 02:10 WIB](#).  
[Diakses 8 september 2023](#)